



Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sokaraja Kidul

¹ Dwi Rahayu Rubianti, ²Wahyuningrat, ³Simin

*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Jenderal
Soedirman*

Abstract

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program is national program to increase infrastructure acces and basic service in urban slum area. Desa Sokaraja Kidul is one of the areas implementing KOTAKU program. The purpose of this research is to find out how the implementation of KOTAKU program at Desa Sokaraja Kidul using What's Happening perspective by Ripley and Franklin. This research is using qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the Implementation of Program KOTAKU (KOTAKU) in Desa Sokaraja Kidul based on dimensions in the perspective of What's Happening by Ripley and Franklin hasn't optimal. The following results of the research based on the perspective dimensions of What's Happening: 1) The Profusion of actors, found that the role of actors at the community level such as BKM and KSM has not been optimal. 2) The Multiplicity and vagueness of goals, The purpose of the KOTAKU Program are understandable and implementing actors understand the program's purposes. 3) The Poliferatin and complexity of government programs, coordination and communication have been effective, policy changes that occur but didn't have significant impact on the program implementation, Guidelines for program implementation have been made but actors at the community level are not aware of the guidance, the sustainability step in the implementation procedure has not optimally implemented. 4) Community Participation, the people of Desa Sokaraja Kidul support and participate in the implementation of the program. 5) Influencing factors, the funds allocated have not been able to solve all slum problems and social and cultural conditions are factors driving implementation while economic conditions are becoming obstacles to implementation.

Keywords : Policy Implementation, Kota Tanpa Kumuh Programs (KOTAKU)

Abstrak

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Desa Sokaraja merupakan salah satu wilayah mengimplementasikan program KOTAKU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul dengan menggunakan perspektif *What's Happening* yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul berdasarkan dimensi-dimensi dalam perspektif *What's Happening* yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin belum berjalan dengan optimal. Berikut merupakan hasil penelitian berdasarkan dimensi perspektif *What's Happening* : 1) Aktor yang terlibat, ditemukan bahwa peran aktor di tingkat masyarakat seperti BKM dan KSM belum optimal. 2) Kejelasan tujuan, Tujuan dari Program KOTAKU sudah jelas dan aktor pelaksana telah memahami tujuan program. 3) Perkembangan dan kerumitan kebijakan, koordinasi dan komunikasi telah berjalan efektif, perubahan kebijakan yang terjadi tidak memiliki dampak signifikan terhadap program, pedoman pelaksanaan program telah ada namun aktor di tingkat masyarakat kurang mengetahui adanya pedoman, tahap keberlanjutan dalam prosedur implementasi belum berjalan. 4) Partisipasi masyarakat, masyarakat Desa Sokaraja Kidul mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program. 5) Faktor yang mempengaruhi, dana yang dialokasikan belum dapat mengatasi semua permasalahan kumuh serta faktor kondisi

sosial dan budaya menjadi faktor pendorong implementasi sedangkan kondisi ekonomi menjadi kendala implementasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : dwirahayurubianti@gmail.com

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Menurut data yang dikumpulkan oleh Direktorat Cipta Karya tahun 2016 menunjukkan total permukiman kumuh yang berada di Indonesia berjumlah 35.291 Ha. Maka dari itu, pemerintah mengadakan program-program sebagai upaya mengatasi masalah permukiman kumuh, Pada saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan program KOTAKU. Luas wilayah permukiman kumuh di Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/1444 tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas sebesar 69,58 Ha dari total wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 17.504 Ha. Terdapat 10 titik wilayah yang terindikasi sebagai kawasan kumuh di Kabupaten Banyumas, berikut merupakan daftar wilayah yang terdeliniasi sebagai wilayah kumuh di Kabupaten Banyumas:

No.	Lokasi	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Keterangan
1	Kelurahan Bancarkembar	5,13	kawasan kumuh sedang
2	Kelurahan Berkoh	10,93	kawasan kumuh sedang
3	Kelurahan Grendeng	5,12	kawasan kumuh sedang
4	Kelurahan Karangwangkal	1,22	kawasan kumuh sedang
5	Kelurahan Kedungwuluh	1,82	kawasan kumuh ringan
6	Kelurahan Kranji	1,47	kawasan kumuh ringan

7	Kelurahan Mersi	7,58	kawasan kumuh ringan
8	Kelurahan Purwokerto Lor	14,72	kawasan kumuh sedang
9	Kelurahan Purwokerto Wetan	2,02	kawasan kumuh sedang
10	Sokaraja Kidul	19,57	kawasan kumuh sedang
Jumlah		69,58	

Tabel 1. Daftar Lokasi Kumuh di Kawasan Kabupaten Banyumas

Sumber : Lampiran SK Bupati Banyumas No.050/144 Tahun 2014

Pada tabel.1 menunjukkan bahwa Desa Sokaraja Kidul merupakan kelurahan/desa yang teridentifikasi sebagai wilayah kumuh dan menjadi wilayah titik fokus pengentasan permukiman pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan luas wilayah kumuh 19,57 Ha yang merupakan kelurahan/desa dengan jumlah wilayah kekumuhan terluas di Kabupaten Banyumas. Maka dari

itu Desa Sokaraja Kidul dipilih sebagai lokasi penelitian. Selain itu, dalam data lampiran SK Bupati Banyumas No.050/144 Tahun 2014 wilayah Desa Sokaraja Kidul dikategorikan dalam kumuh sedang, dimana permasalahan kekumuhan di wilayah ini cukup kompleks. Berikut merupakan tabel untuk menunjukkan kondisi kekumuhan di Desa Sokaraja Kidul :

Tabel 2. Kondisi *Baseline* (awal 2017) Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sokaraja Kidul

Indikator	Kriteria	Kondisi Dilapangan
Kondisi bangunan gedung.	Ketidakteraturan bangunan.	72,11% (411 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul yang memiliki bangunan yang tidak teratur.
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.	34,91% (199 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan.
Kondisi jalan lingkungan.	Cakupan pelayanan jalan lingkungan.	27,39% (2.124 meter) wlayah di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani jalan lingkungan.
	Kualitas permukaan jalan lingkungan.	12,25% (950 meter) jalan lingkungan di Desa Sokaraja Kidul memiliki kualitas jalan yang buruk.
Kondisi penyediaan air minum	Ketersediaan akses aman air minum	42,44% (306 KK) di Desa Sokaraja Kidul belum memiliki akses aman terhadap air minum.
	Tidak	7,63% (55 KK) di Desa Sokaraja Kidul

	terpenuhinya kebutuhan air minum	kebutuhan air minumnya tidak terpenuhi.
Kondisi drainase lingkungan	Ketidaktersediaan drainase	35,43% (2.403 meter) dari total panjang jalan yang ada di Desa Sokaraja Kidul belum dilengkapi dengan drainase.
	Tidak terpeliharanya drainase	64,57% (3.707 meter) drainase di Desa Sokaraja Kidul tidak terpelihara.
	Kualitas konstruksi drainase	30,64% (1759 meter) dari total drainase yang ada di Desa Sokaraja Kidul memiliki kualitas konstruksi yang buruk.
Kondisi pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	22,33% (161 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Lanjutan Tabel 3. Kondisi *Baseline* (awal 2017) Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sokaraja Kidul

	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	41,47% (299 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Kondisi pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan persyaratan teknis	100% (721 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis.
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	47,02% (399KK) di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan standar teknis.
	Tidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	100% (721 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara.
Kondisi proteksi	Ketidaktersediaan prasarana proteksi	65,61% (374 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani

kebakaran	kebakaran	prasarana proteksi kebakaran.
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	100% (570 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani proteksi kebakaran.

Sumber : Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Sokaraja Kidul dan Dokumen Simulasi Pengurangan Kumuh di Sokaraja Kidul Tahun 2019.

Program KOTAKU telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di Desa Sokaraja Kidul, program pengentasan kota kumuh ini sudah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2016 yang merupakan tahap persiapan dan perencanaan, serta tahun 2017 dan 2019 merupakan tahap pelaksanaan program. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama kurun waktu dua tahun di Desa Sokaraja Kidul untuk menangani kekumuhan yaitu pembangunan

jalan, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), *septictank* komunal, drainase dan fasilitas pengolahan sampah. Namun implementasi program belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Dimana setelah program berjalan sejak tahun 2017 masih terdapat beberapa permasalahan yang belum teratasi di wilayah tersebut. Berikut merupakan permasalahan kumuh yang masih ada di Desa Sokaraja Kidul :

Tabel 3. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sokaraja Kidul

Indikator	Kriteria	Kondisi 2019
Kondisi Bangunan Gedung.	Ketidakteraturan bangunan.	69,82% (298 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul yang memiliki bangunan yang tidak teratur.
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.	32,63% (186 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan.
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	27,60% (199 KK) di Desa Sokaraja Kidul belum memiliki akses aman terhadap air minum.
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	12,90% (93 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	21,36% (154 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Kondisi	Ketidakterediaan	65,61% (374 unit) bangunan di Desa

Proteksi Kebakaran	prasarana proteksi kebakaran	Sokaraja Kidul belum terlayani prasarana proteksi kebakaran.
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	100% (570 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani proteksi kebakaran.

Sumber : Dokumen Simulasi Pengurangan Kumuh di Sokaraja Kidul.

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti, permasalahan kekumuhan yang masih belum teratasi di Sokaraja Kidul tersebut terjadi karena masih belum maksimalnya keterlibatan implementor di tingkat masyarakat (Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelopak Swadaya Masyarakat (KSM)). Dimana, tidak semua anggota BKM dan KSM berperan aktif dalam pelaksanaan program KOTAKU serta masih kurangnya pemahaman KSM sebagai pelaksana di lapangan dalam hal pelaksanaan kegiatan program seperti pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul dengan menggunakan perspektif *What's Happening* yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Dimensi perspektif *What's Happening* yaitu 1) Aktor yang terlibat, 2) Kejelasan tujuan, 3)Perkembangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktor yang Terlibat

Teori Ripley dan Franklin menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik aktor yang terlibat dalam proses implementasi berperan penting

dan kerumitan program, 4) Partisipasi terhadap program, 5)Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Sokaraja Kidul khususnya di RW 1 (RT : 01, 06, 07, 08, 09), RW 2 (RT : 01, 07) dan RW 3 (RT : 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08). Lokasi tersebut dipilih karena menjadi fokus pengimplementasian Program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. serta metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

terhadap pencapaian tujuan implementasi kebijakan atau program. Aktor sendiri dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan

proses kebijakan publik. Merekalah pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi yang di dalam proses interaksi dan interelasinya cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifatnya yang harmoni dalam proses itu sendiri (Muhlis Madani, 2011 : 36-37).

Dalam sub aspek aktor yang terlibat, aktor yang terlibat dari kalangan pemerintah adalah Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Banyumas yang merupakan gabungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banyumas. Aktor yang berasal dari pihak swasta adalah askot Mandiri KOTAKU dan tim fasilitator. Aktor yang terlibat dari pihak masyarakat adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Satria Bangun Mandiri dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM yang terlibat dalam implementasi program KOTAKU diantaranya KSM Sejahtera I, KSM Sejahtera II, KSM Sejahtera III yang terlibat pada implementasi program pada tahun 2017 dan KSM Maju, KSM Mandiri yang terlibat pada implementasi program pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian apabila dikaitkan dengan pendapat Ripley dan Franklin dapat dikatakan bahwa program KOTAKU cukup rumit karena melibatkan banyak aktor dalam implementasinya.

Sub aspek peran aktor dalam pelaksanaan program, aktor yang terlibat dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul telah menjalankan peran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam program. Dimana aktor yang memegang peranan paling besar dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul adalah aktor di tingkat lembaga swadaya masyarakat seperti BKM dan KSM. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan pada internal masing masing aktor. Pertama, dalam internal Pokja PKP OPD yang masih memiliki peranan dominan hanya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) saja. Kedua, di internal aktor di tingkat Desa seperti BKM dan KSM terdapat beberapa anggota yang pasif yang menyebabkan anggota yang aktif harus meng-*cover* peran orang yang pasif tersebut. Selain itu, KSM yang bersifat insidental dianggap kurang efektif karena pada dasarnya KSM merupakan lembaga yang berperan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

2. Kejelasan Tujuan

Dalam teori Ripley dan Franklin kejelasan tujuan berpengaruh terhadap pemahaman aktor pelaksana. Hogwood dan Gun (1986:197) menyebutkan kegagalan implementasi disebabkan oleh tiga faktor salah satunya kebijakan yang buruk (*bad policy*) dimana menurut kedua tokoh tersebut

kebijakan yang buruk ditandai dengan salah satunya tujuan dan target kebijakan atau program yang tidak jelas. Maka dari itu dalam suatu program perlu memuat tujuan jelas dan mudah dipahami sehingga akan mempermudah aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Dalam sub aspek kejelasan tujuan dari program kota tanpa kumuh, tujuan program KOTAKU sudah dimuat jelas dalam SE Direktorat Jenderal Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh yaitu untuk meningkatkan akses infrastruktur pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Selain itu di dalam dokumen tersebut juga dijelaskan mengenai output yang diharapkan dari pelaksanaan program, sasaran program dan strategi program untuk mencapai tujuan.

Mengenai pemahaman implementor terhadap tujuan program yang ditetapkan, implementor juga sudah memahami output dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu total wilayah kumuh 0 dan parameter nilai dari seluruh indikator yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan proteksi kebakaran dibawah 16.

3. Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan

Dalam teori Ripley dan Franklin implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh perkembangan dan kerumitan kebijakan itu sendiri. Dalam teori ini kerumitan kebijakan bersangkutan dengan aturan dari kebijakan yang bersangkutan. Dinamisnya suatu aturan dalam sebuah implementasi kebijakan menyebabkan implementasi kebijakan menjadi lebih rumit yang nantinya akan mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Kerumitan kebijakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari perkembangan peraturan, adanya pedoman dan prosedur program. Selanjutnya perkembangan kebijakan dalam teori Ripley dan Franklin dilihat dari manajemen dan koordinasi aktor pelaksana.

Dalam sub aspek perkembangan peraturan/kebijakan program, selama implementasi program KOTAKU terdapat perubahan peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan program yaitu diubahnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Selanjutnya di tatanan teknis

pelaksanaan juga mengalami perubahan, yaitu pada indikator nilai kumuh yang dijadikan parameter output serta jumlah fasilitator yang terlibat dalam pengimplementasian program, yang tadinya 40 orang diubah menjadi 11 orang pada tahun 2019.

Mengenai pola komunikasi dan koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan program, koordinasi berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan program karena dengan adanya koordinasi aktor pelaksana dapat mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, 2011:86). Selain itu dalam pelaksanaan komunikasi memegang peranan penting agar koordinasi antara aktor pelaksana dapat berjalan dengan baik.

Koordinasi dalam implementasi program KOTAKU telah berjalan dengan baik dikarenakan di dalam pedoman pelaksanaan yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh sudah diatur dengan jelas garis koordinasi antara aktor pelaksana. Komunikasi yang dilakukan antar aktor yang terlibat sudah efektif walaupun intensitas komunikasi secara langsung seperti rapat masih minim.

Selanjutnya mengenai sub aspek adanya pedoman pelaksanaan program, dalam program KOTAKU terdapat beberapa dokumen pedoman pelaksanaan program KOTAKU untuk menjadi pedoman bagi aktor

pelaksana untuk bertindak yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh, Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Kabupaten/Kota, Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam sub aspek prosedur implementasi program, implementasi program KOTAKU terdiri dari empat tahapan yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan. Dalam setiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa item kegiatan. Apabila dikaitkan dengan kerumitan program dalam teori Ripley dan Franklin, prosedur implementasi program KOTAKU cukup rumit karena terdiri dari beberapa tahapan dan disetiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa item kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dimana telah melaksanakan kegiatan di tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Walaupun tiga tahapan implementasi sudah dijalankan dengan baik, namun pada tahap terakhir yaitu tahap keberlanjutan khususnya pada kegiatan operasional dan pemeliharaan belum berjalan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran pihak KPP dan BKM untuk melakukan pengawasan

untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan serta tidak adanya kejelasan mengenai peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam tahap keberlanjutan di dalam pedoman pelaksanaan. Tidak adanya peran dari masing-masing pihak dalam realisasi kegiatan operasional dan pemeliharaan ini akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan di lapangan khususnya pada indikator persampahan dan drainase.

4. Partisipasi terhadap Program

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa adanya partisipasi terhadap program menjadi dimensi dalam aspek *what's happening*. Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam program. Masyarakat Desa Sokaraja Kidul mendukung implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul juga dapat dikatakan sudah baik. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul yaitu keterlibatan sebagai tenaga kerja konstruksi, partisipasi swadaya seperti memberikan konsumsi kepada tenaga kerja dan partisipasi dengan cara menghibahkan lahannya untuk pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat di Desa Sokaraja Kidul termasuk partisipasi bebas yaitu partisipasi dimana seorang individu

melibatkan dirinya secara sukarela dalam suatu kegiatan tertentu (Dusseldrop, 1981:24). Selain itu bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Sokaraja Kidul merupakan partisipasi dalam bentuk tenaga dan dalam bentuk harta (Huraerah, 2011:116).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin terdapat beberapa faktor-faktor di luar teknis yang mempengaruhi jalannya implementasi. Faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Pada program KOTAKU faktor yang mempengaruhi implementasi program yang berasal dari internal adalah pendanaan program. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal yaitu mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

Dalam sub aspek sumber dana program KOTAKU, pendanaan program dapat dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi program dalam teori Ripley dan Franklin. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan Edward III yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Selanjutnya Wahab (2012) menjelaskan sumber daya tersebut salah satunya adalah sumberdaya finansial. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa terbatasnya dana yang tersedia menyebabkan kualitas

pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul sumber dana dari program KOTAKU berasal dari APBN dan Swadaya. Dana yang berasal dari APBN disebut BDI (Bantuan Dana Investasi), yang dirubah menjadi BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) pada tahun 2019. Sumber dana yang digunakan dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul berasal dari APBN dan swadaya. Pada tahun 2017 dana yang dialokasikan dalam Implementasi Program KOTAKU berjumlah Rp.507.562.000,00. Dana merupakan alokasi dari dana BDI sebesar Rp. 500.000.000,00 dan dana swadaya sebesar Rp.7.562.000,00. Sedangkan pada tahun 2019 dana yang dialokasikan dari BPM berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 dan dari swadaya masyarakat berjumlah Rp. 29.745.000,00. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul belum dapat mengatasi seluruh permasalahan kumuh di Desa Sokaraja Kidul, hal tersebut terbukti karena masih terdapat permasalahan yaitu mengenai proteksi kebakaran.

Dalam sub aspek kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat, Teori Ripley dan Franklin menyatakan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi program di luar teknis, faktor tersebut bisa berasal dari luar

(eksternal) kebijakan yaitu kondisi sosial, ekonomi, budaya. Suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa, tetapi terjadi pada lingkungan implementasi tertentu. Lingkungan implementasi bisa berbentuk kondisi sosial, ekonomi dan budaya dimana kebijakan itu diimplementasikan (Sofian Effendi:2000). Beranjak dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan suatu kebijakan harus memperhatikan lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan, maka dari itu kondisi sosial, ekonomi dan budaya memiliki peran dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat di Desa Sokaraja Kidul menjadi faktor yang mendorong implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. Sedangkan, kondisi ekonomi warga sekitar menjadi salah satu hal yang menghambat implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. Kondisi ekonomi warga berpengaruh terhadap tahap keberlanjutan, dimana terdapat warga yang merasa keberatan dengan adanya iuran sampah untuk pengelolaan sampah serta kurangnya pemahaman warga untuk penggunaan tempat sampah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi warga menyebabkan permasalahan pada sistem persampahan di tahap keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul belum sepenuhnya berhasil apabila dikaji berdasarkan perspektif *what's happening* yang di kemukakan oleh Ripley dan Franklin. Dimana pada dimensi aktor yang terlibat, dimensi perkembangan dan kerumitan program serta dimensi faktor yang mempengaruhi program belum berjalan dengan baik. Dalam dimensi aktor yang terlibat, dalam pelaksanaannya peran aktor seperti BKM dan KSM belum optimal. Selanjutnya, dalam dimensi perkembangan dan kerumitan program khususnya dalam sub aspek prosedur program, dimana dalam tahap keberlanjutan program masih belum berjalan dengan baik. Pada dimensi faktor yang mempengaruhi program, dalam sub aspek sumber dana yang dialokasikan untuk program masih belum dapat mengatasi semua permasalahan kumuh di Desa Sokaraja Kidul, hal ini terbukti belum teratasinya permasalahan proteksi kebakaran. Sedangkan dalam sub aspek kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi sosial dan budaya masyarakat menjadi faktor yang mendorong implementasi program namun, kondisi ekonomi menjadi kendala dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Aji Ratna Kusuma, Santi Rande & Sahria Aprilliana. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)*. eJurnal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 1: 7034-7048
- Dijan Rahajuni dkk. 2017. *Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (Ksm) Ekonomi Pnpm-Mandiri Perkotaan Pasca Program Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas*.
- Easton, David. 1953 *The Political System*. New York. Knopf
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam*

- Proses Kebijakan Publik*.
Yogtakarta. Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A.Franklin, 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis. Grindle (1980)
- Sri Yuliani dan Gusty Putri Dhini Rosyida. (2017). *Kolaborasi Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Publik, Volume 1, Nomor 2: 33-47
- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: SmartMedia
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tauhid. (2017). *Implementasi Kebijakan dan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) di Kota Bima*.
Jurnal Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3: 118-133
- Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.